



PEMERINTAH  
KOTA BONTANG



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

# OVERVIEW



Wali Kota Bontang  
dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG

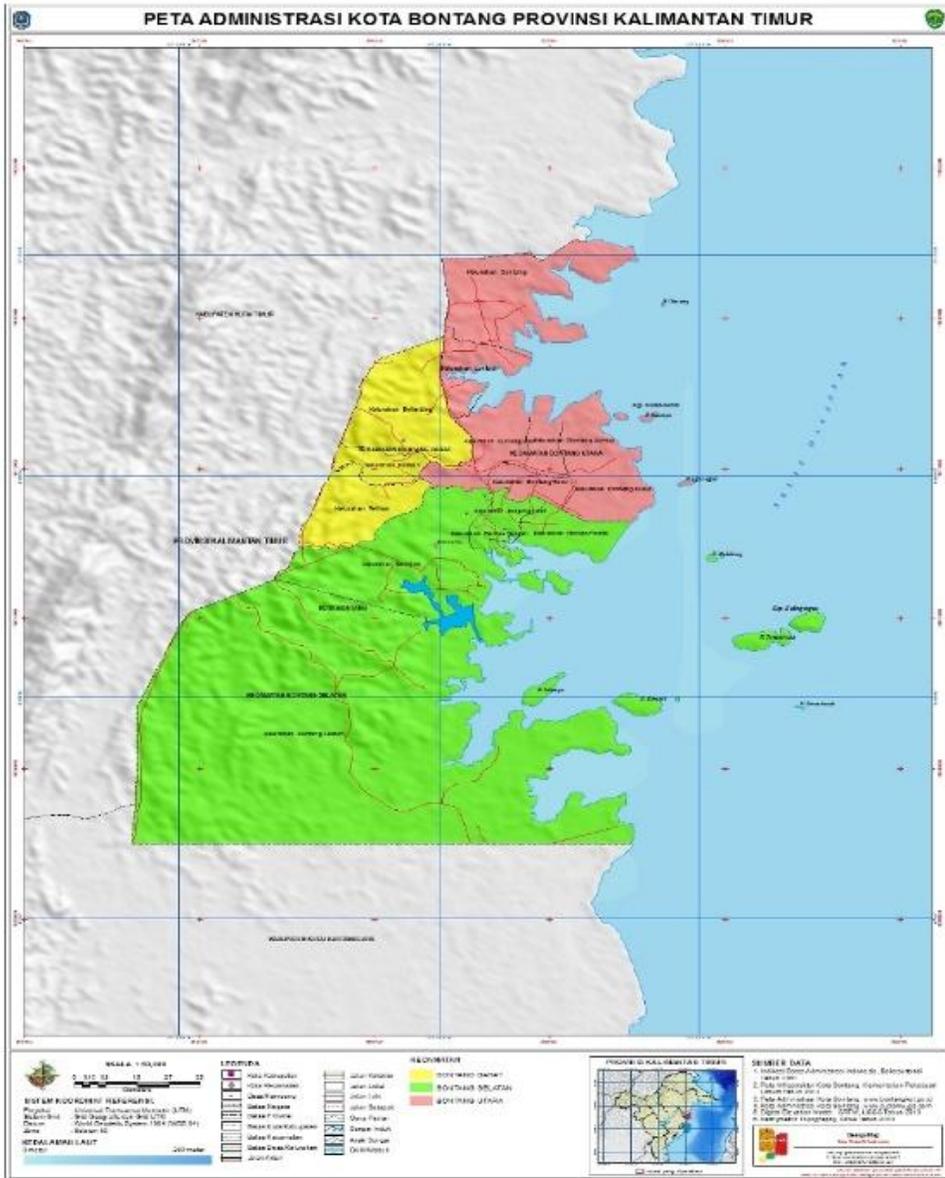


Agus Haris, SH  
Wakil Wali Kota Bontang

## JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

KOTA BONTANG  
TAHUN 2025





Kota Bontang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 15 (lima belas) Kelurahan dengan luas wilayah sekitar **16.188 ha (161,88 km<sup>2</sup>)**. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2024 sebanyak **191.811 jiwa**.

Di kota ini berdiri tiga perusahaan besar di bidang yang berbeda-beda, Badak NGL (gas alam), Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Urea, Amonia liquid dan Pupuk NPK) dan Indominco Mandiri (batubara) serta memiliki kawasan industri petrokimia yang bernama Kaltim Industrial Estate. Kota Bontang memiliki Visi **"TERWUJUDNYA KOTA BONTANG SEBAGAI KOTA INDUSTRI DAN JASA YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI DAERAH MITRA IKN"**



## KEADAAN KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG



**Penduduk Usia Kerja  
138.646 ORANG**



**Jumlah Angkatan Kerja  
93.930 ORANG  
(TPAK: 67,75%)**



**Penduduk Bekerja  
87.299 ORANG**

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  
TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka



**Bukan Angkatan Kerja  
44.716 ORANG**



**Pengangguran Terbuka  
6.631 ORANG  
(TPT: 7,06%)**

# OUTLINE

**1. JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN  
DI KOTA BONTANG**

**2. KEBIJAKAN *BUDGETING***

**3. KEBIJAKAN *NON  
BUDGETING***



## Data Series Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



Pemerintah Kota Bontang telah berperan penting atas upaya pencapaian Universal Coverage Jamsosnaker melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan di Kota Bontang melalui **APBD Kota Bontang** dan **Partisipasi Perusahaan**.

## Year on Year Growth Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Segment	2023	2024	Growth	Growth (%)
Penerima Upah (Formal)	36.120	40.819	4.699	13,01%
Bukan Penerima Upah (Informal)	38.493	41.553	3.060	7,95%
<b>Total</b>	<b>74.613</b>	<b>82.372</b>	<b>7.759</b>	<b>10,40%</b>

## Framework Menuju Universal Coverage Jamsostek di Kota Bontang



**Perpres 111 Tahun 2022**

ttg Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs)



**Inpres 2 Tahun 2021**

Ttg Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



**Inpres 4 Tahun 2022**

Ttg Percepatan Penghapusan kemiskinan Ekstrem di Indonesia



**Manfaat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan**



**RPJMD 2025-2029**

**Sasaran : Meningkatnya daya saing tenaga kerja**

**Arah kebijakan : Peningkatan Perlindungan Penyaluran Tenaga Kerja dan kesempatan Kerja**

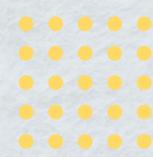
**Strategi : Perlindungan dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan**



**Integrasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Daerah**



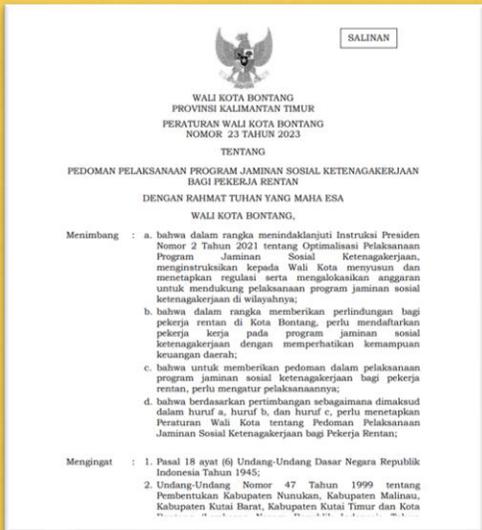
**Universal Coverage Jamsostek**



## Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (*Budgeting*)

**36.777** | Pekerja Rentan  
Pemerintah  
Kota Bontang

**3.935** | Non ASN, Posyandu,  
Penggiat Agama dan  
Petugas RT



Perwali Nomor 23  
Tahun 2023 Tentang  
Pedoman  
Pelaksanaan Program  
Jaminan Sosial  
Ketenagakerjaan Bagi  
Pekerja Rentan

Anggaran TA. 2024  
**Rp. 7.414.243.200**

Anggaran TA. 2025  
**Rp. 7.414.243.200**



Perwali Nomor 59 Tahun  
2019 Tentang Kepesertaan  
BPJS Ketenagakerjaan Bagi  
Seluruh TKD di Kota Bontang

Anggaran TA. 2024  
**Rp. 1.780.436.858**

Anggaran TA. 2025  
**Rp. 1.731.020.378**

# Tim Verifikasi Pekerja Rentan Kota Bontang

- Pemuktahiran Pekerja Rentan dilakukan setiap bulan
- OPD terkait dalam penentuan pekerja rentan setiap bulan :
  - ✓ Inspektorat
  - ✓ DKP3
  - ✓ BPKAD
  - ✓ DISHUB
  - ✓ Bapperida
  - ✓ DSPM
  - ✓ Disnaker
  - ✓ DKUKMPP
  - ✓ Disdukcapil
  - ✓ BPJS Ketenagakerjaan
  - ✓ Bagian Hukum
- Setiap Keputusan tim dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan Keputusan Wali Kota ttg Penerima Bantuan Setiap Bulan.



## Proses Verifikasi Pekerja Rentan Kota Bontang

**POLA VERIFIKASI**

Tim Verivali

1 Mengajukan data tenaga kerja terupdate setiap bulan

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang  
(Pemilik Data)

2

Menyerahkan Data :

1. Penduduk Meninggal
  2. Penduduk Pindah
- Maks tanggal 3 Setiap Bulan

Disdukcapil  
Kota Bontang

3

Menyerahkan Data hasil  
Verifikasi Data dari  
Disdukcapil

BPJS  
Ketenagakerjaan

4

1. Melaporkan Hasil Upload  
Data ke Sistem.
2. Melaporkan hasil data  
Mutasi Pekerja
3. Membuat Surat  
Penagihan Iuran

5

Pengajuan  
Penerbitan SK  
Perubahan  
Data Pekerja  
Rentan

Bagian  
Hukum

6

8

Pembayaran Iuran pekerja rentan

Bankaltimtara

7

SP2D

BPKAD

Penyerahan Dokumen SPM

# Laporan Pembayaran Klaim Pekerja Rentan

Meninggal Dunia

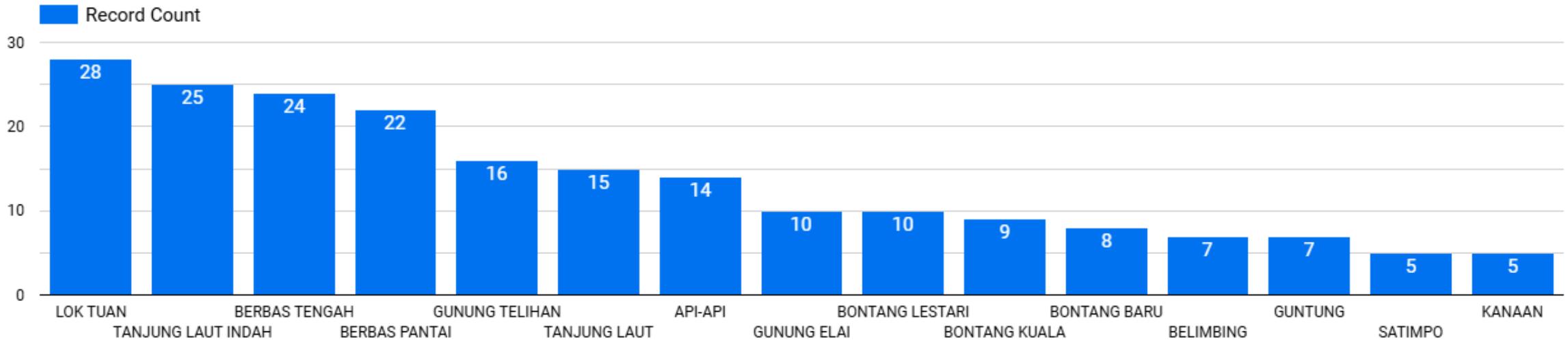
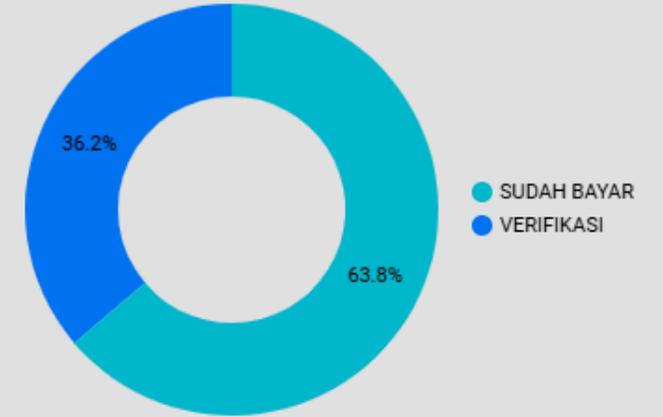
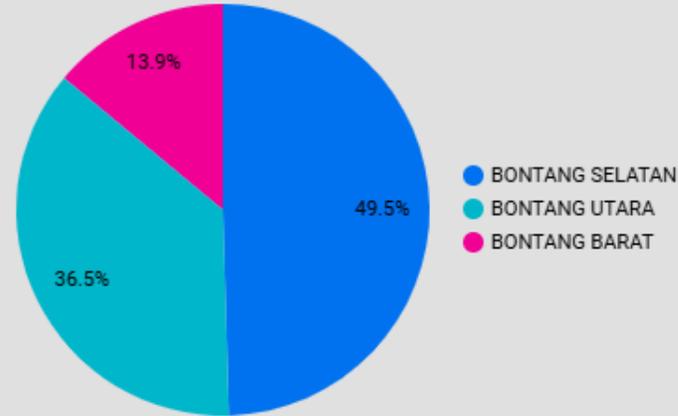
208

Sudah Bayar :

131

Jumlah Nominal Klaim Terbayar :

Rp. 5,680,000,000



## SK Team Kepatuhan Nomor 188.45/371/DISNAKER/2021 Tentang Pembentukan Tim Kepatuhan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Bontang



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK  
TERTENTU KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA  
DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN DI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dan mengatur pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu, perlu memberikan tata cara dalam pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dimana

## Perwali Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi TMP2T



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 188.45/371/DISNAKER/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN OPTIMALISASI PELAKSANAAN  
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA BONTANG

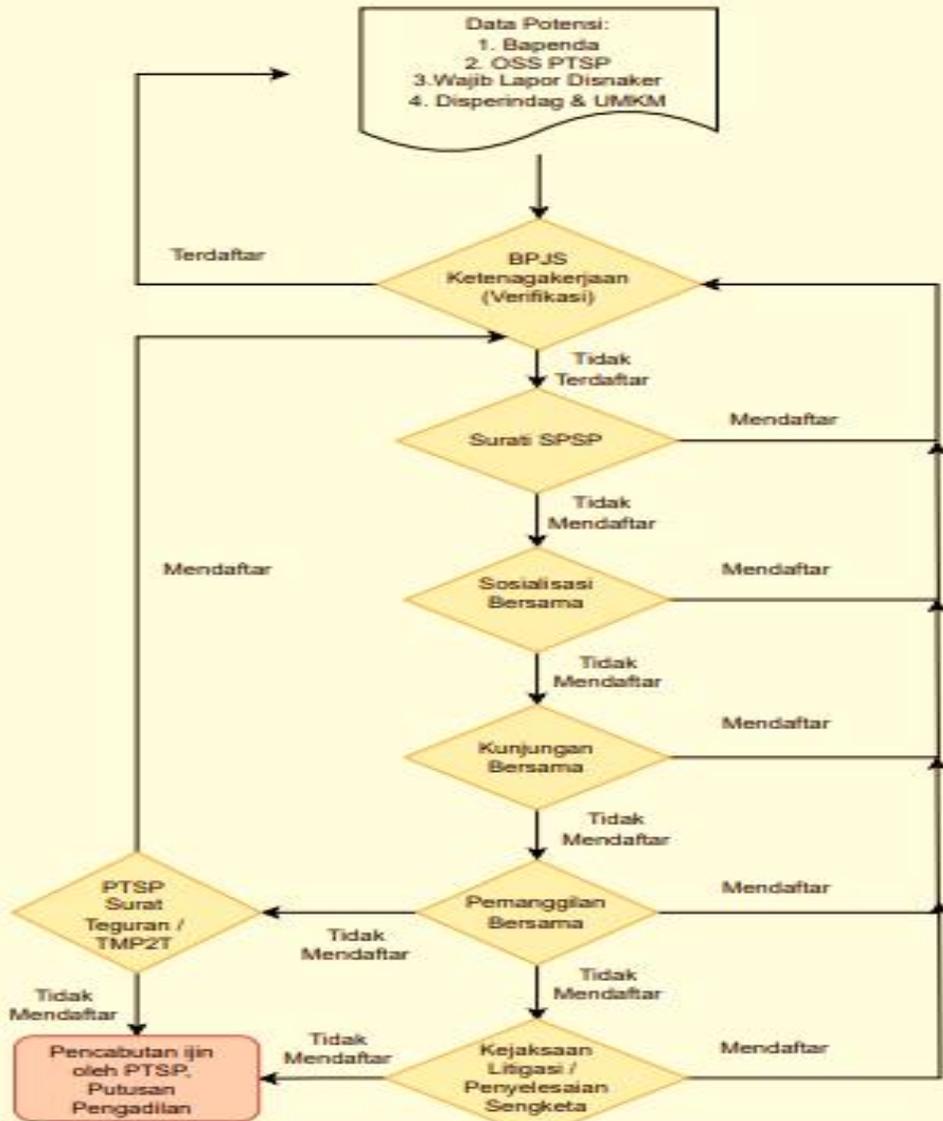
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bontang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Kepatuhan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

## IMPLEMENTASI TIM KEPATUHAN DAN *UNIVERSAL* COVERAGE JAMSOSTEK DALAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN



Tim Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bertugas untuk melakukan edukasi dan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Pemilik Usaha.



# Peran CSR untuk Pekerja Rentan Kota Bontang

## Penyerahan Simbolis Manfaat dari CSR



# Total CSR 2.370

Pekerja Rentan oleh  
CSR Perusahaan

## PDAM Tirta Taman Kota Bontang

## PT. Pupuk Kalimantan Timur



Anggaran Tahun 2024 untuk CSR PKT  
Rp. 457.632.000,- (bagi 2.270 Org)



Anggaran Tahun 2024 untuk CSR PDAM  
Rp. 20.160.000,- (bagi 100 Org)

Surat Himbuan Wali Kota  
Bontang Nomor  
500.15.14/783/DISNAKER  
Tentang  
Himbuan Partisipasi  
Perlindungan Pekerja Rentan  
Melalui Program CSR



## Action Plan Pencapaian *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

### Jangka Pendek :

1. Peningkatan SK Walikota dari tim verifikasi Pekerja Rentan Kota Bontang menjadi Tim Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Bontang.
2. Pengalihan Pembayaran Pekerja Rentan Kota Bontang dari APBD Provinsi ke APBD Kota Bontang sebanyak 4.036 Pekerja.

### Jangka Panjang :

1. Pembuatan Regulasi Berupa Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Bontang pada tahun 2027.
2. Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jamsosnaker (*Universal Coverage*) menjadi 100% pada tahun 2030.



PEMERINTAH  
KOTA BONTANG

BerAKHLAK

#bangga  
melayani  
bangsa



BPJS  
Ketenagakerjaan

# TERIMA KASIH

*"Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Pekerja Indonesia di Kota Bontang"*